

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
PANITIA PENGUJI	III
ORISINALITAS TESIS	IV
ABSTRAK	V
ABSTRACT	VI
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VII
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Tinjauan Pustaka	7
1.5.1. Tindak Pidana (<i>Strafbaar feit</i>)	7
1.5.2. Izin (<i>Vergunning</i>).....	10
1.5.3. Pertambangan Mineral dan Batubara.....	13
1.5.4. Penyalahgunaan Wewenang	15
1.6. Metode Penelitian.....	21
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum	21

1.6.2.	Pendekatan (<i>Approach</i>).....	22
1.6.3.	Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	23
1.6.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	24
1.6.5.	Analisis Bahan Hukum	24
1.7.	Sistematika Penulisan.....	25
BAB II <i>RATIO LEGIS</i> TINDAK PIDANA TENTANG IZIN PERTAMBANGAN		26
2.1.	Sanksi Pidana Izin Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara	26
2.1.1.	Setiap Orang yang Mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK .	27
2.1.2.	Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara	29
2.1.3.	Menyalahgunakan Kewenangannya	37
2.2.	Alasan Hukum (<i>Legal Reasoning</i>) Penghapusan Sanksi atas Tindak Pidana tentang Izin Pertambangan dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara	42
BAB III <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN HAKIM ATAS KASUS PIDANA TENTANG IZIN PERTAMBANGAN		50
3.1.	Tindak Pidana Izin Pertambangan yang Diputus Melalui Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara	50
3.1.1.	Kronologi Kasus	52

3.1.2. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan	57
3.2. Tindak Pidana Izin Pertambangan yang Diputus Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	66
3.2.1. Kronologi Kasus	67
3.2.2. <i>Ratio Decidendi</i> Putusan	77
3.3. Masa Depan Penyalahgunaan Wewenang Izin Pertambangan	80
BAB IV PENUTUP	86
4.1. Simpulan	86
4.2. Saran	88
DAFTAR BACAAN	